BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, yang dikenal sebagai konstitusi, merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konstitusi berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan peraturan atau undang-undang yang mengatur kepentingan publik, dengan tujuan utama untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara, tidak hanya memastikan penerapan amanah yang tercantum dalam berbagai aturan, tetapi juga memberikan arahan kepada setiap lembaga negara, khususnya lembaga pemasyarakatan.

Penjatuhan pidana tidak hanya dilakukan untuk membalas dendam, yang paling penting, itu dilakukan untuk menawarkan bimbingan dan dukungan. bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga membantu terpidana untuk belajar dan menjadi masyarakat yang baik. Konsep pemidanaan baru dianggap sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hanya penjeraan. Di Indonesia, konsep ini dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.¹⁶

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat terakhir dalam proses peradilan pidana di mana pelaku tindak pidana yang telah diputuskan oleh

---

¹⁶ Doris Rahmat et al, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3 (2021),h 2.

hakim untuk menjalani pemidanaan dan dilatih untuk kembali menjadi orang baik. Pembinaan terhadap warga binaan berlangsung sejak mereka memasuki lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah sebuah proses untuk membina narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan bagian dari masyarakat, sebagian orang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.¹⁷

Seperti yang diketahui, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur penempatan tahanan di lembaga pemasyarakatan secara terpisah dan tidak digabungkan berdasarkan beberapa klasifikasi. Tentu saja, perawatan fisik dan psikologis diperlukan untuk narapidana perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana perempuan dilakukan secara terpisah dari narapidana laki-laki dan bertujuan untuk membantu narapidana berubah menjadi lebih baik dan menghindari tindak kejahatan yang sama.¹⁸

Lembaga pemasyarakatan khusus untuk perempuan dibuat karena pendekatan terhadap narapidana perempuan membutuhkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana laki-laki dan remaja. Misalnya, banyak pemicu stres yang sering dihadapi perempuan tetapi tidak dialami

---

¹⁷ Mutfi Ramadhani et al, 'Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Sungguminasa', *Jurnal Administrasi Publik*,2 (2016).h3

¹⁸ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan'.

laki-laki, seperti stres karena harus berpisah dengan anak, sehingga harus ada perbedaan jenis penjara dan kegiatan yang dilakukan.¹⁹

Pembinaan untuk perempuan di lembaga pemasyarakatan harus dirancang agar dapat memberi mereka keterampilan yang relevan dengan kehidupan setelah keluar dari penjara. Beberapa program pelatihan keterampilan mungkin lebih berfokus pada bidang yang dianggap lebih cocok untuk perempuan, seperti keterampilan rumah tangga, kecantikan, atau kerajinan tangan. Namun, penting juga untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh keterampilan yang lebih luas, seperti kewirausahaan, keterampilan teknologi, dan keterampilan profesional yang dapat membantu mereka bersaing di pasar kerja. Sementara itu, untuk narapidana laki-laki, pelatihan keterampilan mungkin lebih difokuskan pada pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, seperti konstruksi, permesinan, atau mekanika. Namun, prinsip dasar pembinaan keterampilan adalah untuk memberi kedua gender kesempatan yang sama untuk berkembang.

Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai tempat untuk membina narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan, dengan tujuan menciptakan pemidanaan yang integratif, yaitu dengan membangun kembali kesatuan hidup masyarakat yang positif dan bermanfaat.

Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah untuk :

---

¹⁹ Puti Halimah et al, 'Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial', *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2 (2015)

1. Melaksanakan rehabilitasi : untuk membantu narapidana memperbaiki diri selama proses rehabilitasi. Untuk memungkinkan narapidana kembali ke masyarakat dengan kondisi mental dan fisik yang lebih baik, rehabilitasi ini bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku buruk mereka dan membantu mereka bangkit kembali. Ini mencakup pelatihan, kursus, dan pelatihan keterampilan yang akan membantu mereka setelah bebas.
2. Mengurangi resosialisasi : proses untuk membantu narapidana kembali beradaptasi dengan kehidupan sosial dan masyarakat setelah mereka bebas. Pemasarakatan berusaha mempercepat proses ini agar narapidana dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan lebih baik. Mereka diajarkan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif dan sehat.
3. Memberikan perlindungan yang baik terhadap narapidana dan masyarakat sepanjang sistem pemasarakatan beroperasi : memberikan perlindungan yang baik bagi masyarakat dan narapidana. Perlindungan ini memastikan bahwa masyarakat dan narapidana merasa aman selama proses pemasarakatan. Selama menjalani hukuman, narapidana harus dilindungi dari hak-haknya, dan masyarakat harus dilindungi dari bahaya yang dapat muncul dari perilaku narapidana yang tidak siap kembali ke masyarakat.²⁰

---

²⁰ Mutfi Ramadhani et al, 'Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Permasarakatan Wanita Klas Ila Sungguminasa', *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2016).h5

Lembaga Pemasyarakatan memainkan peran penting dalam melakukan pembinaan narapidana perempuan, dengan tujuan untuk membantu mereka menjadi individu yang lebih baik. Keberhasilan peran Lembaga Pemasyarakatan sangat bergantung pada seberapa efektif proses pembinaan tersebut dilaksanakan.²¹

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting sebagai wakil negara dalam menghormati hak asasi narapidana melalui pelaksanaan pembinaan. Meskipun berbagai upaya pembinaan telah dilakukan selama masa hukuman, dampak psikologis akibat hukuman penjara tetap terlihat pada narapidana dan memerlukan perhatian serta penanganan yang mendalam.²²

Kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan selalu diawasi oleh petugas, hal ini membuat mereka merasa kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan sering kali merasa dicurigai. Mereka merasa tidak berguna karena terbatas untuk melakukan apapun di sana. Selain itu, mereka juga terfokus pada kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, khawatir dianggap sebagai penjahat oleh masyarakat, yang membuat mereka enggan bersosialisasi. Mereka merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan masa lalu mereka yang pernah dihukum, yang menyebabkan mereka dianggap sebagai penjahat. Semua

---

²¹ Dewi Hapsari Prabandari, 'Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang)', *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3 (2022)

²² Utami, et al. Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal. Penelit. Huk. (2017)*, h 11

ini berdampak pada psikologis mereka, menyebabkan penurunan harga diri dan perasaan tidak berguna.²³

Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina narapidana memiliki tugas untuk memberikan pemahaman tentang norma-norma kehidupan kepada narapidana serta melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan sosial yang dapat membangun rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan masyarakat. Tujuan dari hal ini ialah agar narapidana dapat hidup secara mandiri. Selain itu, narapidana juga harus memiliki ketahanan, yang berarti mereka harus mampu bersaing dalam kehidupan masyarakat tanpa kembali melakukan kejahatan.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 38, berdasarkan hasil litmas, narapidana menerima pembinaan yang mencakup pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian ini melibatkan aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa dengan manfaat dan nilai tambah, di mana hasil dari pembinaan tersebut menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kemandirian dan kepribadian narapidana serta anak binaan, agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Tujuannya agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan hidup dengan wajar sebagai warga negara yang baik.

---

²³ Fajarani, A. S. Tingkat stres dan harga diri narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Bogor. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, (2017), h 2.

²⁴ Utami, et al. Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal. Penelit. Huk.* (2017), h 11

Kemandirian di sini berkaitan dengan kemampuan narapidana untuk menjadi mandiri berarti mereka tidak bergantung pada orang lain dalam hal ekonomi, sosial, dan emosional, termasuk memiliki pekerjaan yang layak, mengelola uang, dan memiliki keterampilan hidup yang diperlukan untuk hidup di luar penjara. Sedangkan kepribadian merujuk pada perubahan mental, sikap, dan perilaku narapidana yang lebih positif. Dengan pembangunan kepribadian ini, seseorang dapat memperoleh nilai-nilai etika dan moral yang lebih baik, menjadi lebih sadar diri, dan memperoleh kontrol diri yang lebih besar, sehingga mereka dapat menghindari terjerumus kembali dalam tindakan kriminal.

Untuk menerapkan sistem pemasyarakatan, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, baik dalam bekerja sama dalam proses pembinaan maupun dalam menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah menyelesaikan hukumannya.²⁵

Berdasarkan sistem pemasyarakatan, melatih narapidana tidaklah mudah dan merupakan tugas yang sangat sulit. Selain perlunya pilihan pelaksanaan yang tepat, kinerja petugas pemasyarakatan juga dapat berdampak pada pencapaian tujuan pemasyarakatan yang merupakan sebagian dari cara peningkatan pembinaan terhadap warga binaan.²⁶

---

²⁵ Doris Rahmat et al, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3 (2021),h 5.

²⁶ Doris Rahmat et al, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3 (2021),h 9.

B. Narapidana Perempuan

Menurut pasal 1 ayat 6 UU No.22 tentang Pemasyarakatan, narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman penjara, baik untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, sampai dengan terpidana mati yang masih menunggu eksekusi putusan, serta sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²⁷

Penempatan Narapidana, sesuai dengan pasal 36 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan faktor lainnya, sesuai dengan hasil asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Dalam penempatan di lembaga pemasyarakatan, narapidana laki-laki dan perempuan harus dipisahkan satu sama lain. Karena narapidana laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial yang berbeda, pembagian ini diperlukan. Misalnya, diperlukan fasilitas yang lebih memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan dan peran mereka sebagai ibu, dan juga narapidana anak-anak harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang khusus untuk anak, yang memiliki program pembinaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan perkembangan mereka. Ini dilakukan agar anak-anak tidak terpapar pengaruh buruk dari narapidana dewasa dan memberikan pembinaan yang lebih baik.

Narapidana dalam sistem pemasyarakatan memiliki hak yang sudah diatur dalam pasal 9 UU No 22 Tahun 2022 :

---

²⁷ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan’.

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya : Selama menjalani hukuman, narapidana tetap dianggap sebagai manusia dengan martabat dan hak-hak dasar. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianut.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani: Semua narapidana berhak atas perawatan medis yang memadai, termasuk juga perawatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka.
- c. Mendapatkan kesempatan untuk pendidikan, pelatihan, dan aktivitas rekreasional, serta peluang untuk mengembangkan potensi diri : Narapidana berhak atas pendidikan dan pelatihan. Ini termasuk pendidikan formal, seperti kursus kejar paket A, B, atau C, dan pelatihan keterampilan yang berguna untuk kehidupan setelah mereka keluar dari penjara.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan gizi : Setiap narapidana berhak menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan gizi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, tanpa memandang status mereka sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan.
- e. Mendapatkan layanan informasi : Hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan yang adil, informasi hukum, dan akses ke sumber daya yang membantu proses rehabilitasi dan pembinaan.

- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum : Selama menjalani hukuman, narapidana berhak atas perlindungan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan akses ke pengadilan, dan mendapatkan pembelaan diri atas segala tindakan yang mereka hadapi selama penahanan.
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan : Narapidana berhak untuk mengajukan pengaduan atau menyampaikan keluhan terkait perlakuan yang mereka alami selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Ini memastikan bahwa narapidana memiliki cara untuk melaporkan jika hak-hak mereka dilanggar atau jika mereka menghadapi perlakuan yang tidak adil.
- h. Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang : Selama menjalani hukuman, narapidana berhak untuk mendapatkan akses ke bahan bacaan seperti buku, surat kabar, atau majalah, serta mengakses siaran media massa yang tidak dilarang, seperti radio atau televisi. Ini akan membantu mereka tetap terinformasi dan memperoleh pengetahuan.
- i. Menerima perlakuan yang manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan semua tindakan yang membahayakan kesehatan fisik dan mental : Narapidana memiliki hak diperlakukan dengan hormat dan dilindungi dari segala bentuk penyiksaan atau kekerasan. Mereka juga berhak tidak dieksploitasi

atau dibiarkan dalam kondisi yang membahayakan kesehatan fisik atau mental mereka.

- j. Memperoleh jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja : Narapidana yang bekerja di lembaga pemasyarakatan berhak atas tempat kerja yang aman dan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan mereka, yang bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial : Narapidana berhak atas pelayanan sosial, yang akan memberikan berbagai jenis bantuan dan dukungan, seperti bimbingan sosial dan psikologis, untuk membantu mereka menyesuaikan diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke kehidupan masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir.
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat : Sesuai dengan aturan yang berlaku, narapidana berhak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, pengacara (advokat), atau masyarakat. Kunjungan ini penting untuk mempertahankan hubungan sosial dan memberikan dukungan kepada narapidana selama menjalani masa hukuman.

Narapidana perempuan adalah wanita yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dan menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Mereka dihukum berdasarkan keputusan

pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Perlakuan terhadap narapidana perempuan harus berbeda dengan narapidana pria, mengingat faktor-faktor alami yang ada pada wanita, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, menyusui, dan merawat anak.

Di mata masyarakat umum, narapidana perempuan dianggap sebagai situasi unik dan luar biasa. Hal ini disebabkan oleh stigma yang ada di masyarakat, yang menganggap perempuan sebagai simbol kelembutan, keindahan, dan kasih sayang. Karena perempuan dianggap lebih pasif, mereka sering kali dikaitkan dengan kejahatan yang dianggap sebagai sisi gelap dan destruktif, yang biasanya melibatkan kekerasan, kelicikan, dan kekejaman, yang dianggap bertentangan dengan sifat alami perempuan.²⁸

Tujuan dari pembinaan narapidana wanita ini adalah untuk memberi mereka lebih banyak bekal untuk menjalani kehidupan bebas setelah mereka menjalani hukuman. Ini sesuai dengan tujuan lembaga untuk menyiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan bukan hanya memiliki tujuan untuk mengubah Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang baik, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Sistem ini juga merupakan implementasi dan bagian tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁹

---

²⁸ Amestia Prasinata Pangabea, 'Makna Hidup Pada Narapidana Perempuan', *Jurnal Mahasiswa Psikologi*, 1.3 (2019), h 2

²⁹ Mutfi Ramadhani et al, 'Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II a Sungguminasa', *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2016).h9

C. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar larangan yang diatur dalam peraturan hukum dan dikenai sanksi pidana. Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, yang terkadang juga disebut delict, yang berasal dari kata Latin delictum.³⁰

Masalah kejahatan terkait tindak pidana narkotika telah menjadi isu global yang terus diperbincangkan. Penyalahgunaan narkoba tentu dapat menyebabkan kerugian fisik, psikologis, emosional, serta memengaruhi sikap masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba yang menjadi ancaman bagi masyarakat dan bangsa, bahkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir baik di tingkat nasional maupun internasional.³¹

Berdasarkan pasal 28H (1) UUD 1945 “Setiap individu berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Tidak dapat dipungkiri bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak atas tempat tinggal dan lingkungan bebas narkoba.³²

Sebagaimana kita ketahui, narkoba bersifat adiktif, dapat merusak tubuh, dan dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Manusia harus

---

³⁰ Tofik Yanuar Chandra, *'Hukum Pidana'*, (Jakarta : Sangir Multi Usaha, 2022), hal 37.

³¹ Anton Sudanto, 'Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Huk (2013)*.h 1

³² Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28h Ayat 1.

menjalani kehidupan yang bersih dan terbebas dari segala sesuatu yang mempengaruhi kesehatan.³³

Selanjutnya, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Narkoba tidak hanya menyebabkan ketergantungan, tetapi juga dapat berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian yang cepat dan tidak wajar. Manusia memerlukan lingkungan yang bersih dan tubuh yang sehat untuk menjalani kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkoba merupakan ancaman utama bagi bangsa dalam mewujudkan generasi penerus yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan zat terlarang.

Narkotika merupakan zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman maupun sintetik, baik yang sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan, sesuai dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Menurut pasal 1 angka 13 UU No. 35/2009 Pecandu Narkotika merupakan seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan mengalami ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Penyalahgunaan Narkotika menurut pasal

---

³³ Anton Sudanto, 'Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Huk (2013)*.h 2.

1 angka 15 UU No. 35/2009 merupakan seseorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau dengan cara melawan hukum. Pasal 127 mengatur hukuman bagi penyalahguna narkoba :

Ayat (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I untuk penggunaan pribadi akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II untuk penggunaan pribadi akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,
- c. Narkotika Golongan III untuk penggunaan pribadi akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2) menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Ayat (3) menyatakan bahwa apabila Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun, dalam praktiknya di lapangan, pengguna atau penyalahguna narkoba sering kali tetap dijatuhi pidana dan dipenjarakan bersama bandar atau pengedar. Seharusnya, penyalahguna narkotika tidak dihukum dengan pidana penjara, melainkan diberikan hukuman alternatif berupa rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan dan memulihkan kondisi mental mereka. Hal ini sesuai dalam pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 yang

menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Berdasarkan fakta tersebut, pemulihan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan sangat penting, karena pada dasarnya mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba. Mereka perlu diberikan program pembinaan yang dapat membantu rehabilitasi mereka untuk pulih dari ketergantungan narkoba, sehingga dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang sehat, bebas dari kecanduan, dan menyadari kesalahan mereka. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia serta menekan peredaran narkoba, karena semakin sedikitnya pengguna narkoba.³⁴

Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan adiktif lainnya merupakan berbagai jenis narkoba yang penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan tertentu, seperti dalam bidang kedokteran, di mana obat-obatan tersebut digunakan untuk mendukung tindakan medis, seperti dalam proses operasi bedah, dengan tujuan yang spesifik.

Namun obat-obatan terlarang tersebut kini dikonsumsi, didistribusikan, dan diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dan kenikmatan sementara tanpa izin dari pihak yang berwenang.

---

³⁴ Dewi Linarsih et al. “Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta”. *Jurnal Hukum : Widya Yuridika* (2021), h2-3

D. Golongan dan Jenis Narkotika

Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan narkotika menjadi tiga kategori. Menurut Pasal 6 Ayat 1 UU Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam golongan sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang hanya bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut, tidak untuk pengobatan, dan memiliki sifat yang sangat adiktif,
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berfungsi sebagai obat dalam situasi tertentu, untuk terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan memiliki potensi tinggi menimbulkan kecanduan,
- c. Narkotika golongan III adalah obat narkotika yang biasa digunakan untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi adiksi yang rendah.³⁵

Peraturan Menteri Kesehatan 30/2023 mencantumkan contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I: termasuk opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamina, serta semua bagian dari tanaman ganja dari genus *Cannabis*, seperti biji, buah, jerami, serta hasil olahan dari tanaman ganja seperti damar ganja dan hasis.

---

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 6 Ayat 1.

- b. Narkotika golongan II: mencakup ekgonina, morfin metobromida, morfina, turunan morfina, dan garam-garam yang berasal dari narkotika golongan ini, termasuk turunan nitrogen pentafalent dari morfina, seperti kodeina-noksida.
- c. Narkotika golongan III: termasuk etilmorfina, kodeina, polkodina, propiram, serta garam-garam dari narkotika golongan ini, dan campuran atau sediaan difenoksin atau difenoksilat yang dicampur dengan bahan non-narkotika.³⁶

E. Faktor Penyalahgunaan Narkoba Oleh Perempuan

Beberapa hal yang menyebabkan perempuan melakukan kejahatan narkotika termasuk kurangnya pemahaman agama, masalah pendidikan, masalah lingkungan, dan masalah keluarga.³⁷

1. Faktor kurangnya pemahaman agama

Agama memberikan nilai bagi kehidupan. Orang yang percaya pada agama melihat nilai-nilai tersebut dengan baik dan menjadi setia kepada perintah dan larangan agama. Sikap tunduk dan patuh adalah hasil dari kesadaran bahwa setiap perintah agama adalah baik dan setiap larangan agama adalah buruk. Namun, berbeda dengan mereka yang kurang pemahamannya terhadap agama, orang-orang yang tidak memahami ajaran agama dengan baik cenderung lebih mudah melawan perintah dan larangan agama. Salah satu contohnya ialah banyaknya individu yang mengaku beragama namun terjerumus dalam kejahatan

---

³⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

³⁷ Fuad Alghi Fari et al, 'Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika', *Jurnal Usm Law Review*, 4 (2021)

narkoba, meskipun agama secara tegas melarang tindakan yang merugikan dan merusak diri sendiri.

2. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga berperan besar dalam peningkatan kasus kejahatan narkoba. Hal ini seringkali terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi, yang membuat mereka terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Akibatnya, mereka lebih rentan untuk terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

3. Faktor dari individu itu sendiri

Keinginan kuat untuk mencoba hal-hal baru, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, serta dorongan untuk mencari kesenangan dan mengikuti tren yang sedang populer, sering kali menjadi faktor pendorong.

4. Faktor pekerjaan

Adanya kebutuhan ekonomi yang menyebabkan bekerja di pekerjaan yang tidak layak yang memerlukan penggunaan narkoba.

5. Faktor lingkungan

Faktor lain yang berperan adalah kondisi dalam keluarga, seperti hubungan yang tidak harmonis antara ayah dan ibu, komunikasi yang buruk antara orang tua dengan anak, serta kurangnya rasa saling menghargai antar anggota keluarga. Selain itu, lingkungan sekolah dan pengaruh teman sebaya juga turut mendorong, misalnya sekolah yang kurang menanamkan disiplin, berada di dekat tempat hiburan, tidak

memberikan cukup ruang bagi siswa untuk mengembangkan diri, serta adanya dorongan untuk diterima dalam kelompok sosial.